HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - HUKUM TATA NEGARA

2003

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 13, LD KABUPATEN TEBO 2003/NO.13 , 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 56 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK : Lahirnya Peraturan Daerah ini dilatarbelakangi oleh berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berikut Peraturan Pelaksananya dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mana Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis Retribusi yang dipungut dan tidak bertentangan dengan Ketentuan yang lebih tinggi, serta oleh kenyataan bahwa pungutan retribusi yang ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sekarang ini sehingga perlu merubah ketentuan pungutan pada Peraturan Daerah yang dimaksud.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 18 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999.

Materi pokok Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 56 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, yaitu ketentuan Pasal 2 mengenai nama, objek, dan subjek retribusi izin usaha jasa konstruksi; ketentuan Pasal 8 mengenai struktur besarnya tarif retribusi yang ditetapkan berdasarkan kualifikasi bidang usaha jasa konstruksi dan sub bidang dari usaha jasa konstruksi; penambahan Pasal 8A mengenai kualifikasi sub bidang usaha jasa konstruksi yang terdiri atas nilai kualifikasi jasa pelaksanaan konstruksi dan jasa perencanaan konstruksi serta sub bidang jasa konstruksi yang meliputi bidang arsitektur, bidang sipil, bidang mekanikal, dan bidang tata lingkungan; penambahan Pasal 8B mengenai tarif kualifikasi jasa konstruksi, tarif sub bidang usaha jasa konstruksi, tarif kualifikasi dan sub bidang usaha jasa konsultan perencanaan, tarif kualifikasi dan sub bidang jasa pengawasan, serta biaya formulir surat permohonan izin; penambahan Pasal 8C mengenai penetapan besar tarif retribusi izin usaha jasa konstruksi untuk tahun pertama dan tahun berikutnya; ketentuan Pasal 9 mengenai kewajiban memiliki izin usaha jasa konstruksi, tata cara permohonan kepada Bupati melalui Bagian Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo, dan persyaratan kelengkapan permohonan; serta ketentuan Pasal 15 mengenai surat izin usaha jasa konstruksi yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini apabila masa berlakunya telah berakhir.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 September 2003.

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Batang Tubuh: 6 Halaman